



IDENTIFIKASI KESENJANGAN KINERJA KONSULTAN PENGAWAS KONSTRUKSI DI KOTA DENPASAR

IDENTIFICATION OF PERFORMANCE GAPS OF CONSTRUCTION SUPERVISION CONSULTANTS IN DENPASAR CITY

Tirtha Damayanti¹, Ni Kadek Sri Ebtha Yuni², Ni Putu Indah Yuliana³, I Gede Bambang Wahyudi⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali, Jalan Kampus Bukit Jimbaran Badung, 80364, Indonesia

Email: tirthadamayanti@pnb.ac.id

Received: 02 November 2024 Revised: 21 Desember 2024 Accepted: 25 Januari 2025 Published: 27 Januari 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan hasil kerja jasa konsultan pengawas konstruksi di Kota Denpasar, dengan fokus pada evaluasi gap antara tingkat kepentingan dan pelaksanaan kebutuhan konsultan pengawas pada proyek pemerintah dan swasta. Data dikumpulkan melalui survei yang mengukur tingkat kepentingan dan pelaksanaan pada 10 kebutuhan konsultan pengawas yang diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil analisis gap menunjukkan bahwa pada proyek pemerintah, sebagian besar kebutuhan konsultan pengawas masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya, dengan gap yang berkisar antara 0,016 hingga 0,231 atau berada pada kategori gap rendah hingga sangat tinggi. Sebanyak 5 dari 10 kebutuhan konsultan pengawas pada proyek pemerintah masuk dalam kategori gap sedang, 1 kebutuhan dalam kategori gap sangat tinggi, dan 4 kebutuhan dalam kategori gap rendah. Pada proyek swasta, gap berkisar antara -0,037 hingga 0,138, dengan 1 kebutuhan pada kategori gap tinggi, 3 pada kategori gap sedang, dan 6 pada kategori gap rendah. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis solusi peningkatan melalui focus group discussion (fgd), yang menghasilkan rekomendasi peningkatan seperti pendidikan dan pelatihan (untuk 4 kebutuhan), pelatihan manajerial, pembuatan prosedur kerja standar, dan sertifikasi keahlian. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja konsultan pengawas konstruksi di Kota Denpasar sesuai dengan harapan pengguna jasa.

Kata Kunci: Analisis Gap, Kinerja Konsultan Pengawas, Tingkat Kepentingan, Tingkat Pelaksanaan

ABSTRACT

This study analyzes efforts to improve the performance of construction supervision consultant services in Denpasar City, focusing on the gap between the importance and implementation of consultant needs in government and private projects. Data were collected via a survey assessing 10 consultant needs, with their validity and reliability tested. The gap analysis revealed that in government projects, most supervisory needs require improvement in implementation, with gaps ranging from 0.016 to 0.231, falling within low to very high gap categories. Five needs were classified as medium gaps, one as very high, and four as low. In private projects, gaps ranged from -0.037 to 0.138, with one need in the high gap category, three in the medium, and six in the low. The study also explored improvement solutions through focus group discussions (fgds), which led to recommendations for enhancements, such as education and training for four needs, managerial training, standard operating procedures, and expertise certification. These improvements are expected to boost the quality and performance of construction supervision consultants in Denpasar City, aligning their work with service users' expectations.

Keywords: Gap Analysis, Level of Implementation, Level of Interest, Performance of Supervisory Consultant

PENDAHULUAN

Konsultan pengawas konstruksi memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan suatu proyek konstruksi, baik proyek pemerintah maupun swasta. Kinerja konsultan pengawas yang optimal dapat mempengaruhi kualitas, biaya, dan waktu penyelesaian proyek (Wulandari dkk., 2024). Pengawasan yang efektif serta penerapan standar kompetensi kerja yang tepat memiliki peran krusial dalam menjamin kualitas hasil pekerjaan. Perusahaan konstruksi perlu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya penerapan standar kompetensi kerja. Selain itu, faktor usia, latar belakang pendidikan, dan sikap tenaga kerja turut memengaruhi implementasi kompetensi di lapangan (Azhari dan Mustofa, 2023).

Konsultan pengawas harus memenuhi standar kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang dirancang untuk tenaga terampil di bidang konstruksi berdasarkan perkembangan teknologi. Kemajuan ini menuntut tenaga kerja berkualitas, bersertifikasi, dan andal guna mendukung penerapan teknologi (Lumempow dkk., 2018).

Namun, di lapangan masih banyak konsultan pengawas yang belum sepenuhnya mengimplementasikan standar tersebut, yang berpotensi menghambat tercapainya hasil yang diharapkan oleh klien.

Penelitian ini berfokus pada evaluasi hasil kerja konsultan pengawas konstruksi di Kota Denpasar, khususnya yang terkait dengan penerapan SKKNI. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan beberapa konsultan pengawas di Kota Denpasar, ditemukan bahwa sebagian besar konsultan pengawas masih belum menguasai atau menerapkan secara optimal dokumen kontrak, pengendalian mutu, serta pengawasan terhadap biaya dan waktu yang

menjadi tanggung jawab mereka. Hipotesis diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengumpulan data (Yam dan Taufik, 2021).

Pada penelitian ini hipotesis penulis mengarah pada terjadinya keterlambatan proyek dan ketidakpuasan dari klien, baik pada proyek pemerintah maupun proyek swasta. Oleh karena itu, perusahaan konsultan pengawas perlu meningkatkan kinerja mereka untuk memenuhi kebutuhan klien dan meminimalkan perbedaan antara harapan klien dan pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kesenjangan (*gap analysis*) untuk mengukur sejauh mana tingkat kepentingan dan pelaksanaan kebutuhan konsultan pengawas sesuai dengan ekspektasi klien. Analisis *gap* ini akan memberikan gambaran mengenai area yang perlu diperbaiki dan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja konsultan pengawas (Taqiudin dkk., 2023)

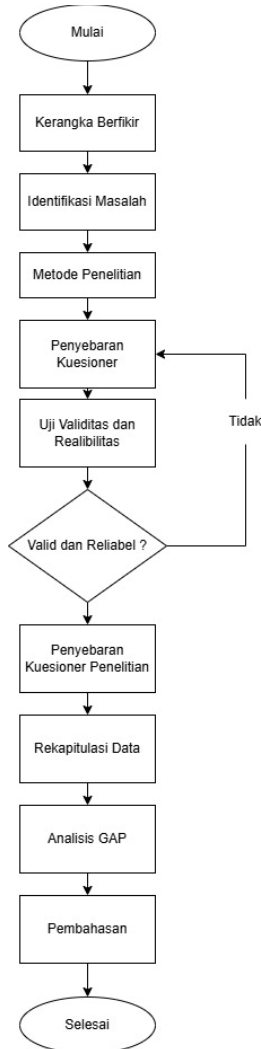
Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan konsultan pengawas di proyek pemerintah dan swasta dengan menggunakan data yang diperoleh melalui survei yang mengukur tingkat kepentingan dan pelaksanaan untuk setiap kebutuhan konsultan. Berdasarkan hasil analisis *gap*, penulis akan merumuskan rekomendasi upaya peningkatan yang mencakup pendidikan dan pelatihan, pelatihan manajerial, pembuatan prosedur kerja standar, dan sertifikasi keahlian bagi konsultan pengawas. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja konsultan pengawas di Kota Denpasar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas proyek konstruksi.

METODE

Penelitian ini di laksanakan di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pada proyek

pemerintah dan proyek swasta di Kota Denpasar.

Diagram alur metode penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1. Alur Metode Penelitian

1. Pengumpulan Data

Merupakan sebuah proses yang terorganisir dalam penelitian, bertujuan untuk menghimpun informasi dari berbagai sumber yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan (Daruhadi dan Sopiati, 2024).

Metode penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah, di mana penulis menganalisis latar belakang dan merumuskan masalah terkait pelaksanaan standar SKKNI jasa konsultan di Kota Denpasar. Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk meningkatkan kinerja perusahaan konsultan dengan mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik konsultan yang sesuai. Selanjutnya, dilakukan studi literatur untuk meninjau teori-teori yang relevan mengenai kebutuhan konsumen, kompetensi konsultan, dan faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna jasa. Hasil studi literatur ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun hipotesis penelitian. Pada tahap pengumpulan data, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada responden, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan pengguna jasa (Fernando dkk., 2022). Data yang terkumpul kemudian disusun dalam tahap tabulasi data, di mana dilakukan pengkategorian dan uji kualitas data melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan data yang digunakan valid dan konsisten.

2. Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis *gap*, merupakan tahap penting dalam merancang penelitian, yang mencakup identifikasi kekosongan atau kesenjangan dalam literatur atau pengetahuan yang ada, yang menjadi pendorong untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut (Rijali, 2018).

Berikut tahap pengolahan data pada penelitian ini dengan menggunakan analisis *gap*:

1. Identifikasi kebutuhan: menentukan kebutuhan konsultan pengawas dalam proyek;
2. Penilaian tingkat kepentingan: menilai seberapa penting masing-masing kebutuhan;
3. Penilaian tingkat pelaksanaan: mengukur seberapa baik kebutuhan tersebut telah diterapkan di lapangan;
4. Perhitungan *gap*: menghitung selisih antara tingkat kepentingan dan tingkat pelaksanaan untuk setiap kebutuhan;
5. Kategorisasi *gap*: mengelompokkan hasil *gap* ke dalam kategori (rendah,

Identifikasi Kesenjangan Kinerja (Damayanti/ hal. 84-92)

sedang, tinggi, sangat tinggi) untuk menentukan prioritas perbaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui apa saja yang perlu di tingkatkan pada masing-masing kebutuhan konsultan perlu dilakukan analisis *gap* (kesenjangan). Analisis kesenjangan (*gap*) dilakukan untuk mengevaluasi apakah layanan konsultan pengawas telah memenuhi kondisi yang diharapkan. Penelitian ini membandingkan perbedaan nilai antara tingkat kepentingan dan tingkat pelaksanaan. Tingkat kepentingan menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan dari kebutuhan konsultan

pengawas, sedangkan tingkat pelaksanaan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

1. Kompetensi Konsultan Pengawas Konstruksi

Standar kompetensi dapat diartikan sebagai acuan yang disepakati untuk mengukur kemampuan seseorang, yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan pekerjaan tertentu (Rahman dkk., 2023). Elemen-elemen kompetensi ini mencakup berbagai keterampilan dan tugas yang harus dikuasai oleh konsultan pengawas dalam menjalankan peran mereka pada proyek konstruksi, baik proyek pemerintah maupun swasta yang akan ditampilkan pada Tabel 1 di bawah ini sebagai berikut.

Tabel 1. Kompetensi Konsultan Pengawas Konstruksi

No	Elemen Kompetensi
1	Menguasai dokumen kontrak kontraktor dan konsultan supervisi
2	Melakukan pertemuan awal konstruksi / PCM (<i>Pre Construction Meeting</i>)
3	Melakukan survei kondisi <i>existing</i> lapangan
4	Melaksanakan pemeriksaan kesiapan kontraktor pelaksanaan pekerjaan
5	Mensupervisi penerapan metode kerja per jenis pekerjaan
6	Melakukan pengendalian mutu, dimensi, biaya dan waktu
7	Melakukan rapat koordinasi mingguan dan non jadwal (khusus)
8	Melakukan pengukuran bersama untuk pembayaran
9	Pembuatan sertifikat pembayaran
10	Melakukan evaluasi kinerja kontraktor, pelaporan dan penyerahan pekerjaan

2. Gap Kebutuhan Konsultan Pengawas Pada Proyek Pemerintah

Pada Tabel 2 memperlihatkan *gap* terkait

kebutuhan konsultan pengawas pada proyek pemerintah.

Tabel 2. *Gap* Kebutuhan Konsultan Pengawas pada Proyek Pemerintah

Pemerintah			
Kode	Tingkat Kepentingan	Tingkat Pelaksanaan	<i>Gap</i>
A	0.40	0.29	0.11
B	0.20	0.07	0.13
C	0.30	0.21	0.09
D	0.23	0.15	0.08
E	0.43	0.33	0.10
F	0.83	0.60	0.23
G	0.23	0.16	0.07
H	0.13	0.11	0.01

Pemerintah			
Kode	Tingkat Kepentingan	Tingkat Pelaksanaan	Gap
I	0.10	0.06	0.04
J	0.40	0.32	0.07

Setelah mendapatkan nilai *gap*, kemudian rata-rata jawaban dibagi 4 kategori dengan prinsip distribusi frekuensi, didapatkan kategori penilaian seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Kategori Penilaian *Gap* Kebutuhan Konsultan Pengawas Pada Proyek Pemerintah

Kategori	Gap	Keterangan
1	0.01-0.07	Rendah
2	0.07-0.14	Sedang
3	0.1-0.21	Tinggi
4	0.21-0.28	Sangat tinggi

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai kesenjangan (*gap*) berkisar antara 0,016 hingga 0,231, yang mencakup kategori dari rendah hingga sangat tinggi. Dari 10 kebutuhan konsultan pengawas pada proyek pemerintah, 5 berada dalam kategori *gap* sedang, 1 dalam kategori *gap* sangat tinggi, dan 4 sisanya dalam kategori *gap* rendah. Dengan demikian, enam kebutuhan ini memerlukan perbaikan lebih lanjut dalam pelaksanaannya pada proyek pemerintah. Adapun keenam tersebut ialah:

1. Menguasai dokumen kontrak kontraktor dan konsultan supervisi;
2. Melakukan pertemuan awal konstruksi/PCM;

3. Melakukan survei kondisi *existing*;
4. Melaksanakan pemeriksaan kesiapan kontraktor pelaksanaan pekerjaan;
5. Mensupervisi penerapan metode kerja per jenis pekerjaan;
6. Melakukan pengendalian mutu, dimensi, biaya dan waktu.

3. *Gap* Kebutuhan Konsultan Pengawas Pada Proyek Swasta

Pada Tabel 4 memperlihatkan *gap* kebutuhan konsultan pengawas pada proyek swasta.

Tabel 4. *Gap* Kebutuhan Konsultan Pengawas pada Proyek Swasta

Swasta			
Kode	Tingkat Kepentingan	Tingkat Pelaksanaan	Gap
A	0.26	0.1	0.10
B	0.20	0.17	0.03
C	0.31	0.25	0.06
D	0.15	0.12	0.02
E	0.41	0.38	0.02
F	0.60	0.60	-0.00
G	0.22	0.21	0.00
H	0.18	0.21	-0.03
I	0.17	0.16	0.01
J	0.31	0.17	0.13

Identifikasi Kesenjangan Kinerja (Damayanti/ hal. 84-92)

Setelah mendapatkan nilai *gap*, kemudian rata-rata jawaban dibagi 4 kategori dengan prinsip distribusi frekuensi. Kategori penilaian ditampilkan pada Tabel 5 di bawah sebagai berikut.

Tabel 5. Kategori Penilaian *Gap* Kebutuhan Konsultan Pengawas Pada Proyek Swasta

Kategori	Gap	Keterangan
1	-0.04 - 0.05	Rendah
2	0.05-0.11	Sedang
3	0.11-0.16	Tinggi
4	0.16-0.22	Sangat tinggi

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai kesenjangan (*gap*) berkisar antara -0,03 hingga 0,13, yang mencerminkan kategori mulai dari rendah hingga sangat tinggi. Dari 10 kebutuhan konsultan pengawas pada proyek swasta, 1 kebutuhan masuk dalam kategori *gap* tinggi, 3 dalam kategori *gap* sedang, dan 6 sisanya termasuk kategori *gap* rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa keempat kebutuhan tersebut masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya pada proyek swasta.

Adapun ke-4 tersebut ialah:

1. Menguasai dokumen kontrak kontraktor dan konsultan supervisi
2. Melakukan survei kondisi *existing*
3. Pembuatan sertifikat pembayaran
4. Melakukan evaluasi kinerja kontraktor, pelaporan dan penyerahan pekerjaan.

4. FGD (*Focus Group Discussion*)

FGD (*Focus Group Discussion*) adalah metode pengumpulan data melalui diskusi kelompok terfokus, yang melibatkan sekelompok orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman tertentu mengenai topik yang dibahas (Massi dan Kallo, 2018). Berdasarkan hasil FGD (*Focus Group Discussion*) yang dilakukan oleh konsultan pengawas yang bertujuan untuk mencari solusi dengan tujuan untuk meningkatkan hasil kerja konsultan pengawas pada proyek pemerintah maupun proyek swasta, agar mampu memenuhi harapan *owner* sebagai pengguna jasa ditampilkan pada Tabel 6 di bawah sebagai berikut.

Tabel 6. Upaya Peningkatan Hasil Kerja Konsultan Pengawas Pada Proyek Pemerintah

No	Kebutuhan	Upaya Peningkatan
1	Menguasai dokumen kontrak kontraktor dan konsultan supervisi	Pelatihan intensif tentang analisis dokumen kontrak dan kondisi kontrak (<i>contract condition</i>).
2	Melakukan pertemuan awal konstruksi/PCM	Pengembangan modul standar untuk pelaksanaan pertemuan awal proyek.
3	Melakukan survei kondisi <i>existing</i>	Peningkatan kapasitas survei melalui teknologi seperti <i>drone</i> dan <i>software</i> survei lapangan.
4	Melaksanakan pemeriksaan kesiapan kontraktor pelaksanaan pekerjaan	Penyusunan <i>checklist</i> kesiapan kontraktor yang terstandar untuk mempermudah proses pemeriksaan.

5	Mensupervisi penerapan metode kerja per jenis pekerjaan	Pemberian pelatihan tentang metode kerja terbaru dan supervisi penerapan metode di lapangan.
6	Melakukan pengendalian mutu, dimensi, biaya, dan waktu	Penyusunan prosedur kerja yang mengintegrasikan pengendalian mutu, dimensi, biaya, dan waktu secara efektif.

Pada Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa terdapat 6 cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil kerja konsultan pengawas pada proyek pemerintah, ialah :

1. Menguasai dokumen kontrak, penting untuk memberikan pelatihan khusus dalam memahami klausul kontrak sehingga konsultan mampu mengidentifikasi tanggung jawab semua pihak;
2. Pertemuan awal konstruksi (PCM), mengembangkan modul standar mempermudah konsultan menjalankan PCM secara profesional dan terstruktur;
3. Survei kondisi *existing*, teknologi seperti *drone* memberikan data lebih

cepat dan akurat dibandingkan metode manual;

4. Pemeriksaan kesiapan kontraktor, *checklist* yang terstandar memastikan semua aspek kesiapan kontraktor dapat diperiksa secara menyeluruh;
5. Supervisi metode kerja, memberikan pelatihan tentang metode kerja terbaru meningkatkan kualitas supervisi di lapangan;
6. Pengendalian mutu, dimensi, biaya, dan waktu, prosedur kerja yang efektif memastikan pengendalian semua aspek tersebut berjalan simultan.

Tabel 7. Upaya Peningkatan Hasil Kerja Konsultan Pengawas Pada Proyek Swasta

No	Kebutuhan	Upaya Peningkatan
1	Menguasai dokumen kontrak kontraktor dan konsultan supervisi	<i>Workshop</i> reguler tentang penguasaan dan pembaruan isi dokumen kontrak sesuai kebutuhan proyek swasta.
2	Melakukan survei kondisi <i>existing</i>	Penggunaan teknologi survei berbasis <i>drone</i> dan pemetaan 3D untuk meningkatkan akurasi data lapangan.
3	Pembuatan sertifikat pembayaran	Pelatihan teknis untuk pembuatan sertifikat pembayaran sesuai standar yang berlaku pada proyek swasta.
4	Melakukan evaluasi kinerja kontraktor, pelaporan, dan penyerahan pekerjaan	Penyusunan format evaluasi kinerja yang terstruktur dan pelatihan teknis terkait pelaporan akhir.

Pada tabel 7 dapat dijelaskan bahwa terdapat 4 cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil kerja konsultan pengawas pada proyek swasta, ialah :

1. Menguasai dokumen kontrak, *workshop* reguler membantu konsultan memperbarui pemahaman mereka Terhadap kebutuhan dokumen kontrak proyek swasta;
2. Survei kondisi *existing*, dengan

teknologi pemetaan modern, konsultan dapat meningkatkan akurasi survei untuk hasil yang lebih baik;

3. Pembuatan sertifikat pembayaran pelatihan teknis memastikan konsultan dapat membuat sertifikat pembayaran dengan akurat dan tepat waktu;
4. Evaluasi kinerja kontraktor dan pelaporan format evaluasi yang terstruktur membantu konsultan

Identifikasi Kesenjangan Kinerja (Damayanti/ hal. 84-92)

memberikan laporan yang lebih informatif dan transparan.

SIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat kepentingan dan pelaksanaan kebutuhan konsultan pengawas pada proyek pemerintah dan swasta. Pada proyek pemerintah, terdapat 6 elemen kompetensi yang memerlukan perbaikan, yaitu penguasaan dokumen kontrak, pertemuan awal konstruksi (PCM), survei kondisi *existing*, pemeriksaan kesiapan kontraktor, supervisi metode kerja, dan pengendalian mutu, dimensi, biaya, serta waktu. Sementara pada proyek swasta, terdapat 4 elemen utama yang membutuhkan peningkatan, yaitu penguasaan dokumen kontrak, survei kondisi *existing*, pembuatan sertifikat pembayaran, serta evaluasi kinerja kontraktor dan pelaporan.

Upaya perbaikan yang diusulkan meliputi pelatihan intensif terkait dokumen kontrak dan metode kerja, penggunaan teknologi modern seperti drone untuk survei lapangan, penyusunan prosedur kerja standar, serta pengembangan format pelaporan dan evaluasi yang terstruktur. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi konsultan pengawas dalam memenuhi kebutuhan proyek, baik pemerintah maupun swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, F. M. dan Mustofa, I. (2023). Strategi Meningkatkan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Pekerja Proyek Konstruksi di Tulungagung. *Engineering and Technology International Journal (EATIJ)*, 5(3), 1–8.
- Daruhadi, G. dan Sopiati, P. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. *Jurnal*

Cendekia Ilmiah (J-CEKI), 3(5), 5423–5443.

Fernando, R., Hidayat, B., dan Istijono, B. (2022). Studi Kepuasan Pengguna Jasa Terhadap Kinerja Konsultan Perencana dalam Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kabupaten Solok. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 938–952.

Lumempow, O. E., Dundu, A. K. T., dan Arsjad, T. T. (2018). Study Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang K3 (Studi Kasus: Pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Teknik Unsrat). *Jurnal Sipil Statik*, 6(12), 1085–1094.

Massi, G. dan Kallo, V. (2018). Efektifitas Pemberian Edukasi dengan Metode Video dan Focus Group Discussion (FGD) Terhadap Tingkat Pengetahuan Pasien DM Tipe 2 di Klinik Diabetes Kimia Farma Husada Manado. *E-journal Keperawatan (e-Kep)*, 6(1), 1–6

Rahman, M. H., Romadhani, N. F., dan Arfandi, A. (2023). Identification of Competence Standards of Building Engineers in Indonesia. *Menara: Jurnal Teknik Sipil*, 18(2), 152–158.

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.

Taqiudin, M., Anggara, D., dan Nukman, N. (2023). Analisis Pengawasan Konstruksi: Kajian Kinerja Konsultan Pengawas di Proyek Gedung RSUD Awet Muda Narmada. *Jurnal Ilmiah Telsinas (Elektro, Sipil dan Teknik Informasi)*, 6(2), 189–195.

Wulandari, A., Dewantoro, dan Puspasari, V. H. (2024). Analisis Kinerja Konsultan Pengawas Konstruksi dalam

Pelaksanaan Proyek di Kota Palangka Raya. *Portal: Jurnal Teknik Sipil*, 16(2), 142–149.

Yam, J. H. dan Taufik, R. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(2). 96–102.